



PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, CURRENT RATIO DAN CAPITAL INTENSITY RATIO TERHADAP EFFECTIVE TAX RATE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015-2019

©

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan lainnya yang sejenis tanpa izin dari Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Mellita

tatamellita.tm@gmail.com
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Amelia Sandra, S.E., Ak., M.Si. M.Ak.

amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

ABSTRAK

Effective Tax Rate adalah tarif pajak aktual yang harus dibayarkan oleh perusahaan dibandingkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Dari *Effective Tax Rate* dapat dilihat bagaimana hasil dari dilakukan manajemen pajak yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik observasi terhadap data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan *audited* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *effective tax rate* (ETR) dan variabel independen untuk penelitian ini adalah kepemilikan institusional, komite audit, dewan komisaris independen, *current ratio* dan *capital intensity ratio*. Sampel penelitian ini sebanyak 58 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015 - 2019. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji pooling, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi (R^2), uji signifikansi simultan (uji F), dan uji koefisien regresi secara parsial (uji t). Hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, komite audit, dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate*, sedangkan *current ratio* dan *capital intensity ratio* berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate*.

Kata Kunci: Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, *Current Ratio*, *Capital Intensity Ratio* dan *Effective Tax Rate*.

ABSTRACT

Effective Tax Rate is the actual tax rate that must be paid by the company compared to the profit generated by the company. From the *effective tax rate*, can be seen how the results of the tax management carried out by the company. This study uses observation techniques to secondary data obtained from annual financial statements and audited financial statements of manufacturer companies listed on the Indonesia period 2015-2019. Dependent variable used in this study is *effective tax rate* (ETR) and the independent variable for this research is Institutional ownership, audit committee, independent board of commissioners, *current ratio*, and *capital intensity ratio*. The sample of this research are 58 manufacturer companies that listed in Indonesia (BEI) period 2015-2019. This research was conducted using the pooling test, classical assumption test, multiple linear regression analysis, coefficient of determination test (R^2), simultaneous significance test (F-test), and partial regression coefficient test (t-test). Test results show that institutional ownership, audit committee and independent board of commissioners has no significant effect on *effective tax rate* with a sig value of 0,107, audit committee and independent board of commissioners has no significant effect on *effective tax rate*, while the *current ratio* and *capital intensity ratio* has a significant effect on the *effective tax rate*.

Keywords: Institutional Ownership, Audit Committee, Independent board of commissioners, *Current Ratio*, *Capital Intensity Ratio* and *Effective Tax Rate*.

PENDAHULUAN

Isu mengenai *corporate governance* di Indonesia semakin mendapat perhatian khusus setelah terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997-1998. Untuk memperbaiki hal tersebut, sejak tahun 1999 telah dibentuk Komite Nasional Kebijakan *Governance* dan mengeluarkan Pedoman GCG yang telah mengalami perbaikan pada tahun-tahun berikutnya. Penerapan *corporate governance* diharapkan dapat



mendorong beberapa hal, salah satunya untuk mendorong manajemen perusahaan agar berperilaku profesional, transparan dan efisien serta mengoptimalkan fungsi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah sumber pendapatan negara yang sangat penting selain pendapatan Sumber Daya Alam dan pendapatan non-pajak lainnya. Aspek pajak merupakan faktor yang dipertimbangkan perusahaan karena pajak merupakan beban yang signifikan dalam perusahaan. Sesuai tujuan mengoptimalkan laba, perusahaan baik domestik maupun multinasional berusaha meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan pajak yang ada. Pemilik perusahaan akan mendorong manajemen untuk melakukan tindakan pajak agresif untuk mengurangi beban pajak yang muncul (Chen et al, 2011). Berbeda dengan pemerintah yang menganggap pajak adalah penerimaan negara yang cukup penting sehingga pemerintah akan menarik pajak setinggi-tingginya. Di Indonesia, usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan tanpa kendala. Seiring berjalannya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Pajak dimata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, namun bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Adanya perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan timbulnya ketidakpatuhan wajib pajak melalui perlawanan terhadap pajak. Salah satu kendala pemerintah dalam upaya pengoptimalan sektor pajak ini adalah *penghindaran pajak (Tax Avoidance)* dan *penggelapan pajak (Tax Evasion)* atau dengan berbagai kebijakan yang diterapkan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar perusahaan, salah satunya adalah perusahaan dapat memilih metode akuntansi yang tepat untuk menurunkan *Effective Tax Rate (ETR)*. Dengan menggunakan *tarif pajak efektif (Effective Tax Rate/ETR)* dapat dijadikan kategori pengukuran perencanaan pajak yang efektif. *Tarif Pajak Efektif Perusahaan (Effective Tax Rate/ETR)* sering digunakan sebagai salah satu acuan oleh para pembuat keputusan dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat kebijakan dalam perusahaan dan memuat kesimpulan sistem perpajakan pada perusahaan.

Effective Tax Rate adalah tarif pajak aktual yang harus dibayarkan oleh perusahaan dibandingkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan (Walby, 2010) Dari *Effective Tax Rate* kita dapat melihat bagaimana hasil dari dilakukannya manajemen pajak yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut. *Effective Tax Rate* dapat dihitung dengan cara membagi kewajiban pajak dengan laba sebelum pajak atau arus kas (Hanlon & Heitzman, 2010). *Effective Tax Rate* yang telah dihitung akan dibandingkan dengan tarif pajak penghasilan badan yang berlaku sesuai oleh Undang-Undang yaitu 25%. Maka dari perbandingan tersebut akan dilihat bagaimana hasil dari manajemen pajak yang telah diterapkan perusahaan tersebut (Minnick & Noga, 2010) Pada perusahaan pemerintah yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia mayoritas pemegang saham berada di tangan pemerintah, oleh karena itu pemerintah dapat mengontrol kegiatan operasional perusahaan. Pemegang saham mayoritas di indikasikan terlibat dalam penetapan besaran *effective tax rate (ETR)* perusahaan dan pada perusahaan pemerintah terdapat indikasi konflik antara pihak manajemen perusahaan dan pemegang saham mayoritas dalam hal kebijakan penetapan besaran *effective tax rate (ETR)* tersebut. *Effective Tax Rate (ETR)* pada dasarnya adalah sebuah persentasi besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. *Effective Tax Rate (ETR)* dihitung atau dinilai berdasarkan pada informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga tarif pajak efektif merupakan bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan.

Dalam penelitian sebelumnya, (Minnick & Noga, 2010) mengemukakan bahwa semakin tinggi kompensasi berbasis saham yang didapat, maka manajemen sendiri akan berusaha untuk mendorong efisiensi pembayaran pajak dengan menekan *GAAP ETR* dan *Cash ETR*. Hal ini dikarenakan pihak manajemen khususnya CEO dan para pemangku direksi akan melakukan apa saja jika hal tersebut dapat meningkatkan insentif mereka dalam hal ini adalah harga kepemilikan yang mereka miliki. Selain itu dalam penelitian (Irawan & Farahmita, 2012) dijelaskan bahwa pemberian kompensasi kepada direksi kurang efektif dalam hal mengoptimalkan pembayaran pajak, sedangkan kepemilikan yang dimiliki oleh direksi lebih efektif dalam mengoptimalkan pembayaran pajak dalam suatu perusahaan. Sedangkan (meilinda, 2013) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak, baik yang diukur dengan *GAAP ETR* maupun *Cash ETR*. Hubungan positif dan signifikan ini dapat terjadi karena penambahan dewan komisaris dalam perusahaan dapat mencegah perusahaan melakukan usaha yang agresif dalam manajemen pajak, sehingga perusahaan lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitasnya, terkait dengan aturan yang berkaitan dengan pajak.

Kasus pajak pernah terjadi di Indonesia salah satunya pada BCA, kasus ini bermula dari keberatan pihak BCA terhadap koreksi pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). BCA menilai bahwa



hasil koreksi DJP terhadap laba fiskal Rp 6,78 triliun harus dikurangi sebesar Rp 5,77 triliun. Alasan BCA karena sudah melakukan transaksi pengalihan aset ke BPPN. Sehingga BCA mengklaim tidak ada pelanggaran terhadap pajak mereka, Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menyelidiki klaim BCA atas pengalihan aset tersebut sampai skema BLBI-BPPN. Karena jika melihat laporan keuangan BCA, kita akan mendapatkan adanya kejanggalan. Dimana indikasinya mengarah ke modus pengelakan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan kajian data dari laporan keuangan BCA, itu terindikasi melakukan kurang pajak pajak penghasilan (PPh) sepanjang tahun 2001-2008, BCA hanya bayar sekitar 20 - 22 persen, bahkan di tahun 2001 hanya 1,23 persen. Padahal menurut dia sesuai dengan Undang-Undang nomor 17/2000 tentang pph, wajib pajak badan dengan penghasilan di atas Rp 100 juta sebesar 30 persen. Namun besaran pajak itu bisa turun sesuai dengan peraturan pemerintah menjadi 25 persen. Hal ini akan merugikan terhadap negara dan perusahaan, pendapatan negara akan berkurang sehingga akan berpengaruh terhadap anggaran suatu Negara. (<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/14/04/27/n4o17o-kasus-pajak-bca-jalan-masuk-penyalahgunaan-blbi>).

Corporate governance atau sering disingkat GCG adalah suatu praktik pengelolaan perusahaan secara amanah dan prudensial dengan mempertimbangkan keseimbangan pemenuhan kepentingan seluruh stakeholders (Nasution, 2016). *Corporate governance* sendiri dipengaruhi berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Pihak-pihak tersebut antara lain dewan komisaris, dewan direksi, pemegang saham, auditor eksternal, auditor internal, komite audit dan panitera perusahaan. Pihak-pihak ini turut ambil adil dalam mengarahkan kemana perusahaan tersebut akan diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut terutama untuk meningkatkan nilai pemegang saham jangka panjang. Beberapa pihak tersebut bahkan memiliki kepemilikan dalam perusahaan yang mereka kelola sehingga mereka akan mengupayakan berbagai cara untuk mencapai tujuannya tersebut termasuk dalam hal mengoptimalkan jumlah pajak yang mereka bayar. Dalam penelitian ini akan diungkap seberapa besar pihak-pihak yang terlibat dalam *corporate governance* mempengaruhi *Effective Tax Rate*, terutama dari pihak pemegang saham yang diwakilkan oleh kepemilikan institusional dan dewan komisaris yang dipilih, dewan direksi yang diwakili kepemilikan manajerial dan pihak auditor yang diwakili oleh komite audit.

Peneliti memilih variabel independen dari mekanisme *corporate governance* yang terbagi menjadi kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris dan komite audit yang merupakan beberapa bagian dari banyak mekanisme *corporate governance*.

Kepemilikan institusional memiliki pengertian kepemilikan yang dimiliki oleh perusahaan seperti bank, perusahaan investasi/asuransi, dan perusahaan lainnya ataupun individu dengan kepemilikan di atas 5% selain kepemilikan manajerial (Simarmata, 2018) Dengan adanya manajemen pajak, hal ini membantu para pemilik saham institusional dalam mengetahui kejelasan resiko pajak dari perusahaan tempat mereka berinvestasi. Penerapan *corporate governance* juga dilatar belakangi oleh masalah struktur kepemilikan. Pada penelitian kali ini, struktur kepemilikan perusahaan akan difokuskan pada struktur kepemilikan institusional. Hal ini karena dengan adanya kepemilikan institusional maka akan ada kontrol yang lebih baik. Dengan adanya manajemen pajak, hal ini membantu para pemilik saham institusional dalam mengetahui kejelasan resiko pajak dari perusahaan tempat mereka berinvestasi. Selain itu jika *ETR* lebih kecil maka beban pajak yang ditanggung oleh para pemegang saham akan lebih ringan. Menurut penelitian (Hanlon & Heitzman, 2010), Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*, sedangkan berdasarkan penelitian (wulansari, 2015), kepemilikan saham institusional memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *effective tax rate*.

Komite audit yang merupakan badan yang dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi dewan komisaris dalam menjalankan perusahaan terutama dalam hal manajemen resiko dan proses audit. Tanggung jawab Komite Audit dalam bidang corporate governance adalah untuk memastikan, bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Pada umumnya komite ini berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan dan pengendalian intern (Mayangsari, 2003) dalam (Annisa, 2012) Menurut (Hanum & Zulaikha, 2013) Komite audit berpengaruh positif terhadap *effective tax rate*, sedangkan menurut (wulansari, 2015) komite audit internal memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *effective tax rate*.

Dewan komisaris Independen yang merupakan orang-orang yang ditunjuk oleh para pemegang saham untuk menjadi badan pengawas untuk mengawasi dewan direksi dalam menjalankan perusahaan. Dewan komisaris independen adalah seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak



menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik. Dewan Komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi (UU No.40 Tahun 2007). Dewan Komisaris sendiri terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris non-independen. Komisaris Independen merupakan Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi, sedangkan Komisaris non-independen merupakan komisaris yang terafiliasi. Pengertian terafiliasi sendiri adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006). Pemegang saham publik cenderung mentaati peraturan perpajakan, karena mengharapkan perusahaan berperan serta dalam pembangunan bagi masyarakat. Menurut (Hanum & Zulaikha, 2013), Komisaris independen berpengaruh positif terhadap *effective tax rate*, dan menurut (wulansari, 2015) proporsi dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *effective tax rate*, sedangkan menurut (Primordia 2015 dalam Refassy, 2016) , Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate*.

Likuiditas adalah kepemilikan sumber dana yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan atau kewajiban yang akan habis masanya atau jatuh tempo. (Ardisamartha 2015 dalam Mumtahanah, 2020) mengatakan *likuiditas* juga dapat diartikan kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk membeli atau menjual aset yang dimiliki. Menurut (Krisnata 2012 dalam Mumtahanah, 2020) menunjukkan hasil bahwa *likuiditas* dan tarif pajak efektif (*effective tax rate*) berpengaruh signifikan, dikarenakan perusahaan yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya tidak akan membayar pajak atau cenderung melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), dapat disimpulkan perusahaan yang memiliki *likuiditas* rendah cenderung memiliki tarif pajak effective (*effective tax rate*) yang rendah. Penelitian (Putri 2017 dalam Mumtahanah, 2020) , menyatakan variabel *likuiditas* tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif (*effective tax rate*) karena jika *likuiditas* suatu perusahaan meningkat maka kondisi arus kas perusahaan dalam kondisi lancar, jika arus kas lancar maka akan berdampak pada profit yang menimbulkan besarnya pajak yang dibayarkan.

Capital intensity ratio sering dikaitkan dengan seberapa besar aktiva tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan. (Rodiguez dan Arias 2012 dalam Ardyansyah, 2014) menyebutkan bahwa aktiva tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aktiva tetap setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aktiva tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aktiva tetap yang rendah (Liu dan Cao 2007 dalam Ardyansyah, 2014) menyebutkan bahwa metode penyusutan aset didorong oleh hukum pajak, sehingga biaya depresiasi dapat dikurangkan pada laba sebelum pajak. Dengan demikian semakin besar proporsi aktiva tetap dan biaya depresiasi modal, perusahaan akan mempunyai *effective tax rate* yang rendah. (Sabli dan Noor 2012 dalam Putri & Lautania, 2016) menjelaskan bahwa perusahaan yang mempunyai aset tetap yang tinggi cenderung melakukan perencanaan pajak, sehingga mempunyai *effective tax rate* yang rendah. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian *Capital Intensity Ratio* berpengaruh negatif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR).

Penelitian ini memilih perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian karena jumlah perusahaan yang tergolong sebagai perusahaan manufaktur memiliki jumlah yang lebih banyak jika dibandingkan dengan perusahaan yang lainnya. Selain itu perusahaan manufaktur juga paling diminati oleh investor.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul : "Pengaruh *corporate governance*, *current ratio* dan *capital intensity ratio* terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019”.

TELAAH PUSTAKA

Teori Agensi

(Jensen & Meckeling, 1976) menjelaskan hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih (principal) memperkerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang untuk pengambilan keputusan. Agency theory mangasumsikan bahwa setiap manusia memiliki sifat egois, yaitu mementingkan kepentingan diri sendiri secara individual. Teori keagenan juga mengimplikasikan terdapat asimetri informasi antara manajer sebagai agen dan pemilik sebagai prisipal. Manajemen sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal sehingga terdapat kesenjangan atau gap akan luasnya informasi yang dimiliki oleh manajemen dengan pemilik.

Teori keagenan yang pertama kali dirintis oleh (Jensen & Meckeling, 1976) mengungkapkan bahwa manajer akan mencari kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan personal di atas



kepentingan pemilik perusahaan. Tindakan manajer tersebut dapat memicu terjadinya biaya keagenan (agency cost). Konflik kepentingan antar manajer dan pemegang saham diminimumkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan yang terkait tersebut. Munculnya mekanisme pengawasan tersebut akan menimbulkan biaya yang disebut biaya agensi (agency cost). Agency cost yang dikeluarkan oleh pemegang saham sehingga akan mengurangi laba yang dihasilkan dan berakibat pada penurunan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, adanya konflik agensi harus diminimalisasi dengan berbagai strategi agar kinerja perusahaan tinggi (Gunawan, 2016 dalam Endrianto, 2010).

a. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Effective Tax Rate*

(Lim, 2011) menjelaskan bahwa aktivitas pemegang saham melalui keterlibatan yang lebih besar dari investor institusi akan membantu untuk meningkatkan efek penghindaran pajak demi kepentingan pemegang saham (beban pajak yang lebih rendah) dimana para pemegang saham yang lebih besar akan melakukan intervensi terhadap manajemen yang bertujuan untuk meminimalisir jumlah pajak dan meningkatkan kekayaan dirinya sendiri. Kepemilikan institusional sebagai pengawas yang berasal dari eksternal akan mendorong manajemen perusahaan dengan melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan agar dalam menghasilkan laba berdasarkan aturan yang berlaku, karena pada dasarnya kepemilikan institusional lebih melihat seberapa jauh manajemen taat kepada aturan dalam menghasilkan laba (Hanum & Zulaikha, 2013) Maka dari itu, kepemilikan institusional memiliki peran untuk menetapkan kebijakan pajak yang terkait tingkat pajak efektif. Menurut penelitian (Hanum & Zulaikha, 2013), Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*, sedangkan berdasarkan penelitian Wulansari (2015), kepemilikan saham institusional memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *effective tax rate*.

H₁ : Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *Effective Tax Rate*

b. Pengaruh Komite Audit Terhadap *Effective Tax Rate*

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris (BAPEPAMLK, 2012). Pihak investor menganggap bahwa dengan adanya komite audit menjadi nilai tambah bagi sebuah perusahaan. Investor akan lebih merasa aman jika berinvestasi pada perusahaan yang telah menerapkan GCG. Dengan adanya komite audit akan memberikan pengawasan terhadap suatu manajemen perusahaan sehingga dapat menetapkan kebijakan perpajakan yang dapat mempengaruhi tarif pajak efektif. Menurut (Hanum & Zulaikha, 2013), Komite audit berpengaruh positif terhadap *effective tax rate*, sedangkan menurut (Wulansari, 2015), komite audit internal memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *effective tax rate*.

H₂ : Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Effective Tax Rate*

c. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Effective Tax Rate*

Dewan Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain. Dalam hal ini dewan komisaris tidak boleh melibatkan diri dalam tugas-tugas manajemen dan tidak boleh mewakili perusahaan dalam transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Komisaris independen memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berasal dari luar perusahaan, maka semakin banyak komisaris independen maka pengawasan manajemen akan semakin ketat sehingga dapat memberikan jaminan hasil yang efektif dan efisien termasuk pada kebijakan mengenai besaran tarif pajak efektif perusahaan. Menurut (Hanum & Zulaikha, 2013), Komisaris independen berpengaruh positif terhadap *effective tax rate*, dan menurut (Wulansari, 2015), proporsi dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *effective tax rate*, sedangkan menurut (Primordia 2015 dalam Refassy, 2017), Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate*.

H₃ : Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap *Effective Tax Rate*

d. Pengaruh *Current Ratio* Terhadap *Effective Tax Rate*

Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Putri & Lautania, 2016). Apabila perusahaan memiliki rasio likuiditas yang cukup tinggi menunjukkan perusahaan berada pada kondisi likuit. Salah satu alat yang digunakan dalam mengukur tingkat likuiditas perusahaan yaitu *Current Rasio*. *Current Rasio* menunjukkan besarnya kas yang dimiliki perusahaan ditambah asset-asset yang bisa berubah menjadi kas dalam jangka waktu dekat atau tidak lebih dari satu tahun, pada tanggal tertentu seperti tercantum pada neraca (Hanafi dan Halim, 2012:202 dalam Ariani & Hasyim, 2018). Likuiditas berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate* (ETR).

H₄ : *Current Ratio* berpengaruh negatif terhadap *Effective Tax Rate*



e. **Pengaruh *Capital Intensity Ratio* terhadap *Effective Tax Rate***

Capital Intensity Ratio adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk tarif tetap (intensitas modal). Hampir semua tarif tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan (Hanum & Zulaikha, 2013)

(Rodiguez dan Arias 2012 dalam Ardyansyah, 2014) menyebutkan bahwa aktiva tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aktiva tetap setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aktiva tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aktiva tetap yang rendah.

(Putri & Lautania, 2016) yang menyatakan bahwa perusahaan diperbolehkan untuk meyusutkan asset tetap sesuai dengan perkiraan masa manfaat pada kebijakan perusahaan, sedangkan dalam prefensi perpajakan asset tetap mempunyai masa manfaat tertentu yang umumnya lebih cepat dibandingkan perusahaan sehingga membuat *effective tax rate* lebih rendah. *Capital Intensity Ratio* berpengaruh signifikan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Sedangkan menurut Citra (2016;798) dalam (Mesrawati et al., 2020) adalah *Capital Intensity ratio* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap *Effective tax rate* perusahaan manufaktur yang listing di BEI.

H5: *Capital Intensity Ratio* berpengaruh positif terhadap *Effective Tax Rate*

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah *effective tax rate* pada perusahaan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019 yang terbagi menjadi 3 sektor yaitu : Sektor industri barang konsumsi, Sektor industri dasar & kimia dan Sektor aneka industri, yang terdiri dari 144 perusahaan. Data dalam penelitian ini diambil dari situs resmi dari Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id

Variabel Penelitian

Variabel Dependen

Menurut Sekaran & Bougie (2017:77) variabel dependen merupakan variabel yang menjadi fokus utama peneliti dengan tujuan untuk dipahami dan dideskripsikan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan variabilitas dari variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Effective Tax Rate*, yang akan diukur dengan cara menghitung *Effective Tax Rate*, dimana *Effective Tax Rate* sendiri adalah alat untuk mengukur apakah perusahaan tersebut berhasil dalam melaksanakan kebijakan pajak atau tidak. *Effective Tax Rate* diukur berdasarkan beban pajak pendapatan yang dihitung sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan atas penghasilan kena pajak. Pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut :

Effective Tax Rate dihitung dengan membandingkan beban pajak pendapatan (*income tax expense*) dengan laba sebelum pajak penghasilan (*earning before tax*). Beban pajak penghasilan diambil dari Laporan Laba Rugi pada pos pajak penghasilan sedangkan laba perusahaan sebelum pajak diambil dari pos laba sebelum pajak penghasilan. Perhitungan diatas adalah cara menghitung *Effective Tax Rate* menurut (Hanlon & Heitzman, 2010) Peneliti memilih *Effective Tax Rate* sebagai proxi dari *Effective Tax Rate* dikarenakan peneliti ingin meneliti pengaruh jangka panjang dari *corporate governance* terhadap *Effective Tax Rate*. Sehingga peneliti memilih *Effective Tax Rate* yang memperhitungkan pajak kini dan pajak tangguhan sehingga merefleksikan manajemen pajak jangka panjang dalam suatu perusahaan.

Variabel Independen

Variabel bebas (independen) merupakan variabel yang memengaruhi variabel dependen baik pengaruh positif maupun negatif (Sekaran & Bougie, 2017:79).

1. **Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan Institutional adalah kepemilikan yang dimiliki oleh perusahaan seperti bank, perusahaan investasi/asuransi, dan perusahaan lainnya ataupun individu dengan kepemilikan diatas 5% selain kepemilikan manajerial. Kepemilikan instituonal dapat dihitung dengan cara berikut :

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBILKKG.



Besar kecilnya kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan (Fadhilah, 2014 Dalam aprianingsih astri, 2016) penelitian ini kepemilikan institusional akan diukur menggunakan presentase kepemilikan institusional.

2. Komite Audit

Penelitian ini menggunakan indikator jumlah anggota komite audit dalam mengukur variabel komite audit. Dasar penggunaan indikator tersebut mengacu pada penelitian Simarmata (2018), Lestari (2020), serta Aprianingsih (2016) yang merumuskan komite audit sebagai berikut:

3. Dewan Komisaris Independen

Dalam penelitian ini proporsi dewan komisaris dihitung dari persentase jumlah dewan komisaris independen dengan total dewan komisaris yang ada didalam perusahaan yang dijadikan sampel. Cara perhitungannya sebagai berikut :

$$\text{Dewan Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

Dewan Komisaris Independen pada penelitian ini diukur berdasarkan penelitian dari (Rahmawati et al., 2016)

4. Current Ratio

Current Rasio menunjukkan besarnya kas yang dimiliki perusahaan ditambah asset-aset yang bisa berubah menjadi kas dalam jangka waktu dekat atau tidak lebih dari satu tahun, pada tanggal tertentu seperti tercantum pada neraca (Hanafi dan Halim, 2012 dalam Ariani & Hasyim, 2018). *Current ratio* dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

5. Capital Intensity Ratio

Capital intensity ratio adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang berkaitan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal) dan persediaan (intensitas persediaan) (Ambarukmi dan Diana, 2017 dalam Ariani & Hasyim, 2018)). *Capital Intensity Ratio* dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Capital Intensity Ratio} = \frac{\text{Investasi}}{\text{Aset Tetap}}$$

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai penulis adalah sumber yang telah ada dan dikumpulkan oleh penulis dengan studi pengamatan terhadap data sekunder pada laporan tahunan dan laporan keuangan yang telah diaudit perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Data yang berhubungan dengan informasi perusahaan yang dibutuhkan bagi penelitian ini diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini teknik yang dipakai dalam mengambil sampel adalah dengan cara *judgment sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pemilihan sampel menggunakan metode *judgment sampling* bertujuan untuk memperoleh sampel yang representative berdasarkan kriteria tertentu. Pemilihan sampel yang dipertimbangkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

No	Kriteria	Total
1	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2015-2019	144
2	Perusahaan Manufaktur <i>listing</i> dan <i>delisting</i> selama periode tahun 2015-2019	(17)
3	Perusahaan Manufaktur yang mengalami kerugian pada selama periode tahun 2015-2019	(51)

2. Dilat yang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Copyright © 2020 by Kwik Kian Gie (Sistem Bisnis dan Informatika) (Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



4	Perusahaan Manufaktur yang tidak melaporkan keuangan dalam mata uang Rupiah periode tahun 2015-2019	(18)
Total Perusahaan Sampel		58
Total Periode Tahun Penelitian		5

Teknik Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Menurut Ghazali (2018:19), statistik deskriptif merupakan teknik analisis yang menggambarkan atau mendeskripsikan data penelitian melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), standar deviasi, *sum*, *range*, kurtosis, dan kemencengan distribusi. Teknik analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi dari masing-masing variabel.

2. Uji Kesamaan Koefisien

Data dalam penelitian ini merupakan gabungan data *cross sectional* dan *time series*. Data *cross sectional* merupakan data dari satu atau lebih variabel yang diamati dalam satu periode yang sama, sementara data *time series data* terkait satu variabel yang diamati dalam kurun waktu tertentu (lebih dari satu tahun). Menurut Ghazali (2018:183) *Chow Test* yang ditemukan oleh Gregory Chow digunakan sebagai alat untuk menguji kesamaan koefisien. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian yang terdiri dari data *cross sectional* dan *time series* dapat digabungkan atau tidak. Kriteria keputusan dalam uji kesamaan koefisien adalah sebagai berikut:

- Bila $p\text{-value} < \alpha$ (0,05) maka terdapat perbedaan koefisien dan tidak dapat dilakukan penggabungan kedua jenis data (tidak dapat dilakukan *pooling data*). Maka pengujian data penelitian harus dilakukan per tahun.
- Bila $p\text{-value} > \alpha$ (0,05) maka tidak terdapat perbedaan koefisien dan dapat dilakukan penggabungan kedua jenis data (dapat dilakukan *pooling data*). Maka pengujian data penelitian dapat dilakukan selama periode penelitian dalam satu kali uji.

3. Uji Asumsi Klasik

Sebelum regresi berganda terdapat empat pengujian yang dilakukan yaitu:

a. Uji Normalitas

Menurut Ghazali (2018:161) uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi berdistribusi secara normal atau tidak. Model distribusi yang baik adalah yang berdistribusi normal. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov*. Apabila tingkat signifikansi *Asymp Sig. (2-tailed)* menghasilkan nilai signifikansi di atas $\alpha = 0,05$ dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Dasar pengambilan keputusan:

- Jika *Asymp Sig. (2-tailed)* \geq nilai α (0,05), maka model regresi menghasilkan nilai residual yang berdistribusi normal.
- Jika *Asymp Sig. (2-tailed)* $<$ nilai α (0,05), maka model regresi tidak menghasilkan nilai residual yang berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2018:107). Model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi antar variabel independen di dalam atau variabel independen bersifat ortogonal. Uji multikolinieritas yang digunakan penelitian ini adalah dengan menggunakan besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance* dengan bantuan SPSS 25. Dasar pengambilan keputusan:

- Jika nilai *tolerance* $\geq 0,1$ atau $VIF \leq 10$, maka tidak terdapat multikolinieritas.
- Jika nilai *tolerance* $\leq 0,1$ atau $VIF \geq 10$, maka terdapat multikolinieritas.

c. Uji Autokorelasi

Menurut Ghazali (2018:111) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar residual pada periode tertentu dengan residual pada periode sebelumnya dalam model regresi linear. Model regresi yang memenuhi syarat ialah model regresi yang bebas dari autokorelasi. Penelitian ini menguji ada atau tidaknya autokorelasi dengan menggunakan uji *Durbin-Watson's (DW-test)* dengan bantuan SPSS 25 dengan dasar pengambilan keputusan:



- (1) Jika d terletak di antara d_u dan $(4-d_u)$, maka tidak terdapat autokorelasi ($r = 0$).
- (2) Jika $d < d_l$ atau lebih besar dari $(4-d_l)$, maka terdapat autokorelasi ($r \neq 0$).

C

Hak Cipta Milik Kwik Kian:Ghe (Kwik Kian:Ghe) dan Undang-Undang Republik Indonesia. Penyalinan atau sebarang bentuk penyalinan, baik secara elektronik atau cetak, tanpa izin IBILKKG.

1. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh isi dari dokumen ini untuk tujuan komersial atau untuk tujuan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Ada beberapa uji statistik yang dapat digunakan, yaitu melihat grafik plot, uji park, uji gletser, dan uji white. Uji statistik yang digunakan adalah metode scatter plot. Dengan dasar analisis sebagai berikut:

- (1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- (2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Dalam penelitian ini analisis regresi berganda digunakan untuk memprediksikan hubungan antara kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, *current ratio* dan *capital intensity ratio*, terhadap *effective tax rate*.

Adapun persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + 1X_1 + 2X_2 + 3X_3 + 4X_4 + 5X_5 +$$

Keterangan :

- Y = ETR
- X1 = Kepemilikan Institusional
- X2 = Komisaris Independen
- X3 = Komite Audit
- X4 = *Current Ratio*
- X5 = *Capital Intensity Ratio*
- α = Konstanta
- 1, 2, 3, 4, 5 = Koefisien regresi
- = *Error Term*

a. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa signifikan pengaruh masing-masing variabel independen (sacara parsial) dalam menjelaskan varians variabel dependen (Ghozali, 2018). Pengujian menggunakan nilai signifikansi $\alpha = 0,05$ atau 5%.

b. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F memiliki tujuan untuk mengetahui apakah persamaan model regresi dapat digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018 : 98).

Hipotesis statistik yang digunakan adalah sebagai berikut:

H0 : $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$

Ha : Tidak semua $\beta = 0$

Kriteria pengambilan keputusan:

- (1) Jika $Sig F < \alpha$ (0,05) maka model regresi signifikan sehingga dapat digunakan, artinya tolak H0.
- (2) Jika $Sig F \geq \alpha$ (0,05) maka model regresi tidak signifikan sehingga tidak dapat digunakan, artinya tidak tolak H0.

Jika nilai F signifikan secara statistik maka hal ini menunjukkan bahwa semua variabel bebas secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, apabila nilai F tidak signifikan secara statistik maka semua variabel bebas bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat.



c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur kemampuan variabel-variabel independen dalam sebuah model dalam menjelaskan varians variabel dependennya (Ghozali, 2018:97). Nilai koefisien determinasi (R^2) berada di antara nol (0) sampai satu (1). Semakin kecil nilai (R^2) maka dapat dikatakan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya sangat terbatas. Sebaliknya apabila nilai semakin besar (mendekati 1) maka dapat dikatakan bahwa variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi varians variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan:

- (1) Jika $R^2 = 0$, berarti tidak ada hubungan antar X dan Y, atau model regresi yang terbentuk tidak tepat untuk memprediksi Y.
- (2) Jika $R^2 = 1$, berarti ada hubungan antara X dan Y, atau model regresi yang terbentuk dapat memprediksi Y secara tepat.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Effective Tax Rate*

Hasil uji statistik t menunjukkan koefisien regresi sebesar -0,033 dengan nilai signifikansi sebesar $0,107 = 5\%$. Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap *effective tax rate*. Tetapi arahnya sudah sama dengan hipotesis yaitu negatif dimana semakin banyak kepemilikan institusional semakin kecil *Effective Tax Rate* tetapi untuk penelitian kali ini besar kecilnya kepemilikan institusional tidak mempengaruhi besar kecilnya *Effective Tax Rate*. Hasil analisis regresi ini sejalan dengan penelitian terdahulu (Hanum & Zulaikha, 2013) yang menemukan bahwa Kepemilikan Institusional secara statistik komisaris independen berpengaruh positif namun tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate* (ETR), sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate*. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan (Armada Muji, 2018) yang menyatakan hasil analisis menggunakan regresi linier berganda, hasil menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Uji deskriptif menjelaskan bahwa tingginya pemegang saham institusi ini maka dapat diindikasikan bahwa perusahaan semakin taat dan patuh terhadap pemegang saham karena pemegang saham tidak hanya dari satu profesi melainkan dari berbagai profesi dalam pengawasan perusahaan. Pengawasan yang tinggi akan membuat pihak agen dalam membuat keputusan juga harus memikirkan secara matang mengenai keputusan yang diambilnya, tidak terkecuali keputusan dalam meminimalisir beban pajak.

Jika dilihat dari tingkat signifikansinya yang dilakukan oleh (Hanum & Zulaikha, 2013) pengungkapan variabel kepemilikan institusional yang berarti bahwa variabel tersebut tidak terbukti dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *effective tax rate* (ETR). Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa investor institusional secara statistik berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *effective tax rate* (ETR), sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak. Analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa investor institusional terbukti secara statistik tidak signifikan terhadap *effective tax rate* (ETR). Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan institusional pada perusahaan yang telah listing di BEI kurang dapat mengontrol perusahaan secara langsung sehingga kurang tercapainya kinerja perusahaan yang efektif dan efisien bagi para stakeholder perusahaan, terutama dalam hal kebijakan yang berkaitan dengan tarif pajak efektif. Investor institusional pada perusahaan lebih cenderung untuk memilih jalur aman dengan mengikuti semua regulasi yang telah dikeluarkan dan ditetapkan pemerintah. Selain itu terdapat indikasi bahwa para investor institusional tidak memiliki kemampuan untuk mengintervensi manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasional dan dalam perumusan kebijakan maupun strategi khususnya yang terkait dengan besaran tingkat pajak efektif perusahaan.

Pengaruh Komite Audit terhadap *Effective Tax Rate*

Hasil uji statistik t menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,014 dengan nilai $0,212 = 5\%$. Hasil ini menunjukkan bahwa komite audit tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap *Effective Tax Rate* dengan arah positif (semakin banyak jumlah komite audit semakin tinggi persentase *Effective Tax Rate*). Hasil ini sesuai dengan statistis deskriptif dimana rata-rata komite audit 3 (jika menurut OJK maksimal 3) jumlah ini melebihi aturan OJK dan rata-rata *Effective Tax Rate* di deskriptif juga melebihi tarif normal PPh badan 25%.

Penelitian ini sejalan dengan (Hanum & Zulaikha, 2013) variabel komite audit tidak terbukti dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *effective tax rate* (ETR). Hasil tersebut menunjukkan bahwa komite audit yang merupakan bagian dari perseroan mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan pengevaluasian terhadap kinerja operasioanal perusahaan tidak berjalan dengan baik. (Sriwedari, 2012) menjelaskan bahwa keberadaan komite audit yang fungsinya untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak ada



dukungan dari seluruh elemen dari dalam perusahaan. Berdasarkan hasil tersebut komite audit diindikasikan dalam pelaksanaannya kurang didukung oleh elemen-elemen lain yang berada di dalam perusahaan menyebabkan komite audit gagal melakukan pengawasan yang baik dan lebih cenderung netral. Jumlah anggota komite audit pada perusahaan tidak memberikan jaminan bahwa perusahaan akan memiliki nilai *effective tax rate* yang baik dan jumlah komite audit tidak memberikan jaminan dapat melakukan intervensi dalam peran penentuan kebijakan besaran tarif pajak efektif perusahaan.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Effective Tax Rate*

Hasil uji statistik t menunjukkan koefisien regresi sebesar -0,074 dengan nilai sebesar 0,202 = 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak terbukti berpengaruh secara signifikan dan memiliki arah negatif terhadap *effective tax rate*. Hal yang diduga mengapa dewan komisaris independen tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap *effective tax rate* adalah tidak semua dewan komisaris independen menunjukkan fungsi independensinya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan alasan lain adalah sulitnya koordinasi antar anggota dewan komisaris sehingga menghambat proses pengawasan dan juga komisaris independen kurang tanggap dalam memperhatikan tingkat *effective tax rate* dalam perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Primordia 2015 dalam Refassy, 2017), Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate*. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Sabli dan Noor (2012) dalam (Hanum & Zulaikha, 2013) dimana berdasarkan penelitiannya dihasilkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate*. Menjelaskan bahwa kurangnya pengetahuan mengenai latar belakang kegiatan bisnis perusahaan dapat mempengaruhi kinerja pengawasan komisaris independen terhadap manajemen perusahaan dan mengakibatkan gagalnya perumusan strategi perusahaan yang efektif termasuk dalam strategi yang berhubungan dengan pajak.

Proporsi yang lebih banyak dalam dewan komisaris independen tidak dapat memberikan jaminan bahwa perusahaan akan berjalan dengan efektif dan baik sesuai dengan keinginan manajemen perusahaan. Dewan komisaris independen dalam perusahaan diindikasikan berperan sebagai pihak ketiga dimana posisinya netral antara perusahaan dan manajemen serta berperan aktif dalam penentuan kebijakan manajemen yang bersifat independen sehingga para investor akan lebih percaya kepada manajemen perusahaan.

Pengaruh *Current Ratio* terhadap *Effective Tax Rate*

Hasil uji statistik t menunjukkan koefisien regresi sebesar -0,005 dengan nilai signifikansi sebesar 0,007 = 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa *current ratio* terbukti berpengaruh secara signifikan dan memiliki arah negatif terhadap *effective tax rate*. Apabila *current ratio* suatu perusahaan meningkat berarti kondisi arus kas perusahaan dalam keadaan lancar. Lancarnya arus kas mengakibatkan pada profit dan profit perusahaan akan membayar pajak lebih besar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Ariani & Hasyim, 2018) *current ratio* berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*. Bradley (1994) dan Siahaan (2005) dalam (Fikriyah, 2012) menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas kemungkinan tidak akan mematuhi peraturan perpajakan dan cenderung melakukan penghindaran pajak sehingga semakin rendah nilai likuiditas suatu perusahaan, maka semakin tinggi kemungkinan perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Tindakan tersebut dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan arus kasnya.

Pengaruh *Capital Intensity Ratio* terhadap *Effective Tax Rate*

Hasil uji statistik t menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,000 dengan nilai signifikansi sebesar 0,0295 = 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa *capital intensity ratio* berpengaruh signifikan namun memiliki arah negatif sehingga tidak cukup bukti berpengaruh secara signifikan terhadap *effective tax rate*. Apabila *Capital Intensity Ratio* pada perusahaan tidak mempengaruhi besaran tarif pajak yang dihasilkan oleh perusahaan dan terdapat indikasi bahwa pada perusahaan mayoritas menginvestasikan modalnya pada persediaan (intensitas persediaan).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Ardyansyah, 2014) *capital intensity ratio* berpengaruh terhadap *effective tax rate* variabel *capital intensity ratio* mempunyai arah yang negatif. Menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai aset tetap yang tinggi menanggung beban pajak yang tinggi. Hal ini dikarenakan beberapa perusahaan mempunyai aset tetap yang sudah habis manfaat ekonominya tetapi tidak dihentikan pengakuannya dan untuk aset bergerak seperti kendaraan jika dibawa pulang oleh penggunanya maka tidak semua biaya penyusutan atau pemeliharaan dapat dibebankan melainkan hanya sebesar 50%. Adanya perlakuan terhadap biaya penyusutan terhadap aset tetap dapat mempengaruhi perhitungan jumlah pajak yang ditanggung perusahaan.



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah melakukan pengujian maka penelitian yang dilakukan oleh penulis menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate*
2. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate*
3. Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate*
4. *Current Ratio* berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*
5. *Capital Intensity Ratio* berpengaruh terhadap *effective tax rate*

Saran

Guna melengkapi dan meningkatkan hasil penelitian selanjutnya, penulis mengungkapkan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Bagi akademis
Dapat menjadi bahan untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang implementasi *Good Corporate Governance*, *Current Ratio* dan *Capital Intensity Ratio*.
2. Untuk penelitian selanjutnya

Diharapkan dapat menggunakan variabel lain yang berpengaruh terhadap *effective tax rate*.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, N. A. (2012). *pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance*. 123–136.
- Aprianingsih, A. (2016). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance, Struktur Kepemilikan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang Terdaftar di BEI 2011-2014. *Universitas Negeri Yogyakarta*.
- aprianingsih astri. (2016). pengaruh penerapan good corporate governance, struktur kepemilikan, dan ukuran perusahaan yang terdaftar di bei. *Carbohydrate Polymers*, 17(1), 1–13.
- Ardyansyah, zulaikha / danis /. (2014). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 371–379.
- Ariani, M. & Hasyim, M. (2018). The Effect of Profitability, Liquidity, Leverage, Size, and Capital Intensity Ratio on Effective Rate (ETR). *BALANCE Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1), 496.
- Armadani Muji. (2018). *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Capital Intensity, Preferensi Risiko Eksekutif, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak*. 21, 1–9.
- Bachtiar, M. D. (2015). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, Dan Capital Intensity Terhadap Effective Tax Rate (Etr). *Akuntansi*, 1–70.
- BAPEPAMLK. (2012). Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. *Prasetyo Wahyu Adi Suryo*.
- bowerman, bruce L. (2014). Business Statistics in Practice. In *MSOR Connections* (Vol. 3, Issue 2).
- Chen, et al. (2011). *Aspek pajak merupakan faktor yang dipertimbangkan perusahaan karena pajak merupakan beban yang signifikan dalam perusahaan*. 38, 33–36.
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2014). Business Research Methods 12th Edition. In *Business Research Methods*.
- endrianto, wendy (2010). teori agensi. *Akuntansi*, 1976, 7–49.
- Fikriyah. (2012). Analisis Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas dan Karakteristik Kepemilikan Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *FAKULTAS EKONOMI UIN MALIKI MALANG*, 66(1), 37–39.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 25, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. *Cetakan Ke, 9*.
- Ghozali I. (2018). *aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS 20*. universitas diponegoro.

- Gunawan, R. M. B. (2016). (2016). *GRC (Good Governance, Risk Management, and Compliance): Konsep dan Penerapannya*. PT RajaGrafindo Persada.
- Halperin, R., & Sansing, R. C. (2005). Is the Effective Tax Rate an Effective Performance Measure? *SSRN Electronic Journal*, July.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178.
- Hanum, H. R., & Zulaikha. (2013). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 1–10.
- Hawan, H. P., & Farahmita, A. (2012). Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak. *Sna* 15, 20.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Racial diversity and its asymmetry within and across hierarchical levels: The effects on financial performance. *Human Relations*, 72(10), 1671–1696.
- KNKG. (2006). *PEDOMAN UMUM GOOD CORPORATE INDONESIA*.
- Lesari, D. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2018. *Universitas Pancasila Tegal*.
- Lim, Y. (2011). Tax avoidance, cost of debt and shareholder activism: Evidence from Korea. *Journal of Banking and Finance*, 35(2), 456–470.
- mardiasmo. (2016). *perpajakan edisi terbaru 2016* (edisi 2016). andi.
- merlinda, maria. (2013). Pengaruh Corporate Governance. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 2, 1–107.
- Mesrawati, M., Meiharlina, J., Sherly, S., Syahputra, L., Chintyani, C., & Cicilia, S. (2020). Pengaruh Leverage, Profitabilitas Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Effective Tax Rate Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Di Bei Tahun 2015-2018. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 697–708.
- Minnick, K., & Noga, T. (2010). Do corporate governance characteristics influence tax management. *Journal of Corporate Finance*, 16(5), 703–718.
- Mulyani, darminto sri. (2014). *pengaruh karakteristik perusahaan, koneksi politik dan reformasi perpajakan terhadap penghindaran pajak (studi pada perusahaan manufaktur yang terdapat di bursa efek tahun 2008–2012)*: 66(3), 37–39.
- Mumtahanah, shavira I. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Inventory Intensity Ratio, Likuiditas, Activity Ratio, dan Leverage Terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Skripsi*, 1–153.
- Noor, R. M., Fazillah, N. S. M., & Mastuki, N. (2010). Corporate Tax Planning: A Study On Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 1(2), 189–193. r
- nurmantu safri. (2005). *pengantar perpajakan*. granit.
- Putri, C. L., & Lautania, M. F. (2016). Pengaruh Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership Structure dan Profitability Terhadap Effective Tax Rate (ETR) studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 101–119.
- Rahmawati, A., W, endang m g, & Rachma, agusti rosanita. (2016). pengaruh pengungkapan corporate social responsibility dan corporate governance terhadap tax avoidance studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bei periode 2012-2014. *Carbohydrate Polymers*, 17(1), 1–13.
- Refassy, H. S. (2017). *primadonia*. 1–16.
- Richardson, G., & Lanis, R. (2007). Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 26(6), 689–704.
- sawir agnes. (2010). *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Research Methods for Business, 6th Edition: A Skill Building Approach*. John Wiley & Sons.
- Simarmata, A. M. (2018). Analisa Pengaruh Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility





dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Jasa Property dan Real Estate. *Universitas Sumatera Utara*.

Sriwedari, T. (2012). Mekanisme Good Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Mediasi*, 4(1), 78–88.

Telaumbanua, : Kaminudin. (2016). pengertian current ratio, tujuan dan manfaat current ratio, faktor-faktor yang mempengaruhi current ratio dan pengukuran current ratio. *Akuntansi*, 224, 1–16.

Walby, K. (2010). What is the difference between statutory , average , marginal and effective tax rates ? *Fairtax.Org*, 23–26. www.fairtax.org

Waluyo (2011). *pengertian perpajakan, fungsi pajak, jenis pajak, sistem pemungutan pajak. 2012*(Gambar D, 6–20

wulansari, rahati. (2015). pengaruh karakteristik corporate governance terhadap effective tax rate (ETR). *Jurnal Akuntansi*, 4(2015), 1–13.